



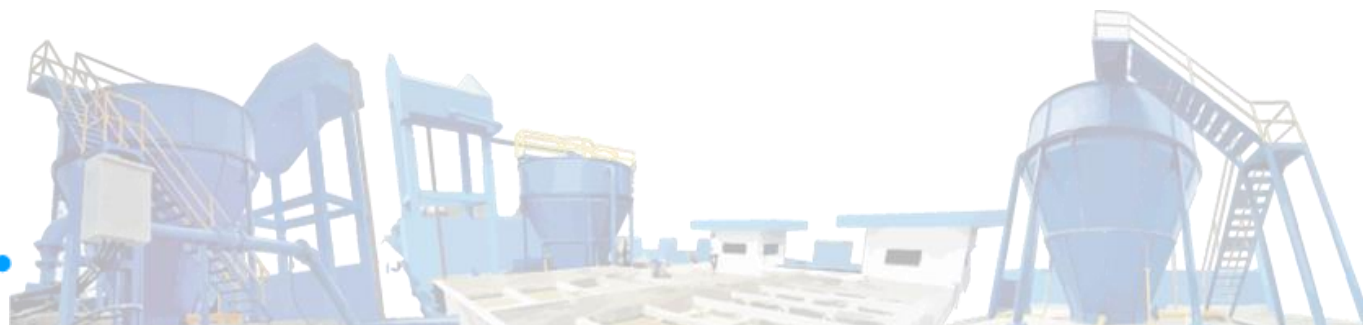
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT AIR MINUM



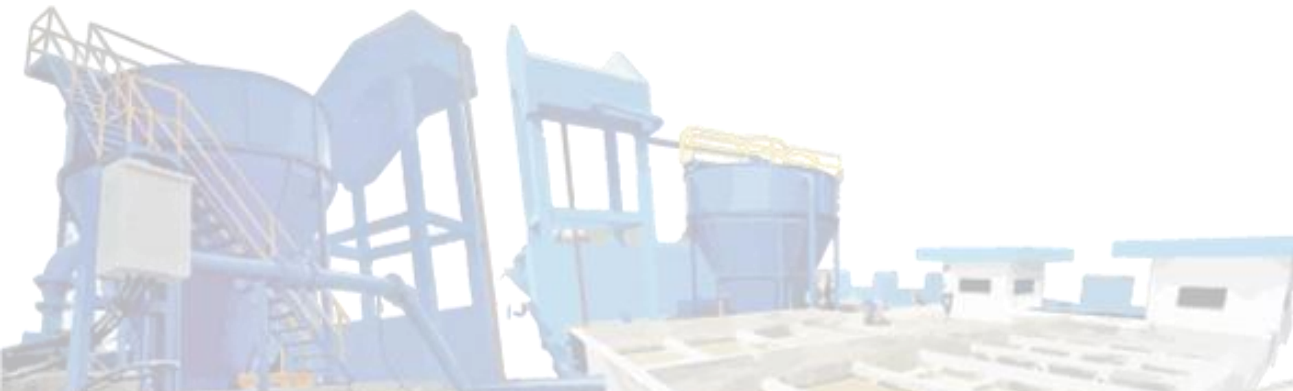
FGD Pemetaan Kelembagaan Pemda dan BUMD Air Minum Serta Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Dukungan NUWSP Terhadap Pemenuhan Target Nasional Pengelolaan Air Minum

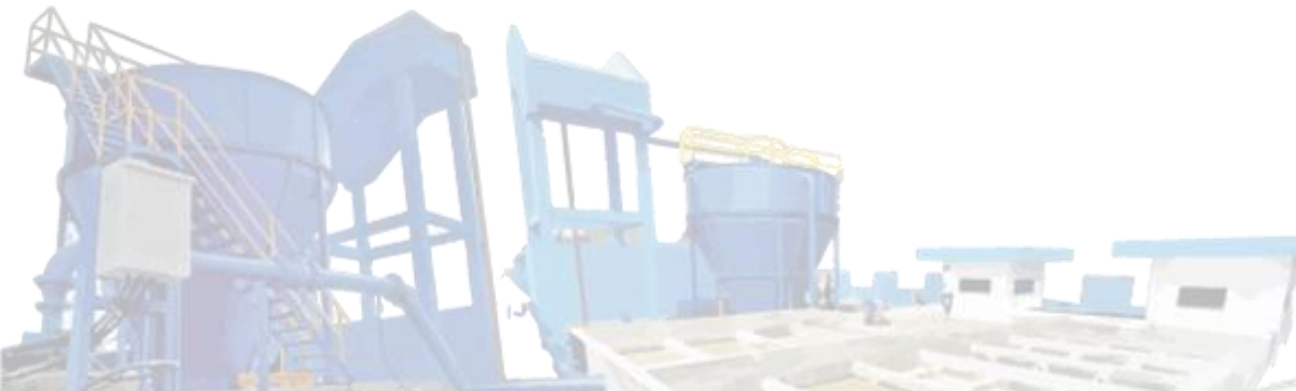
JAKARTA, 18 OKTOBER 2021



- A. OVERVIEW NUWSP**
- B. STATUS KOMPONEN 1 TA 2020-2021**
- C. CAPAIAN DAN TARGET KPI**
- D. ISU STRATEGIS DAN TINDAK LANJUT**
- E. SKEMA BANTUAN PENDAMPING**
- F. KETENTUAN TEKNIS BANTUAN PENDAMPING**
- G. READINESS CRITERIA (RC) BANTUAN PENDAMPING**



A OVERVIEW NUWSP



OVERVIEW NUWSP

NAMA PROYEK PHLN	:	<i>National Urban Water Supply Project (NUWSP)</i>
SUMBER DANA	:	PINJAMAN BANK DUNIA
NOMOR NPPHLN DAN REGISTER	:	1CPUK3GA/ IBRD-8872 ID
TANGGAL PENANDATANGANAN NPPHLN	:	02 Agustus 2018
TANGGAL EFEKTIF	:	08 Agustus 2018
TANGGAL PENUTUPAN	:	31 Desember 2022
NILAI PENDANAAN	:	100,000,000 USD
EXECUTING AGENCY	:	Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR
IMPLEMENTING AGENCY	:	Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri

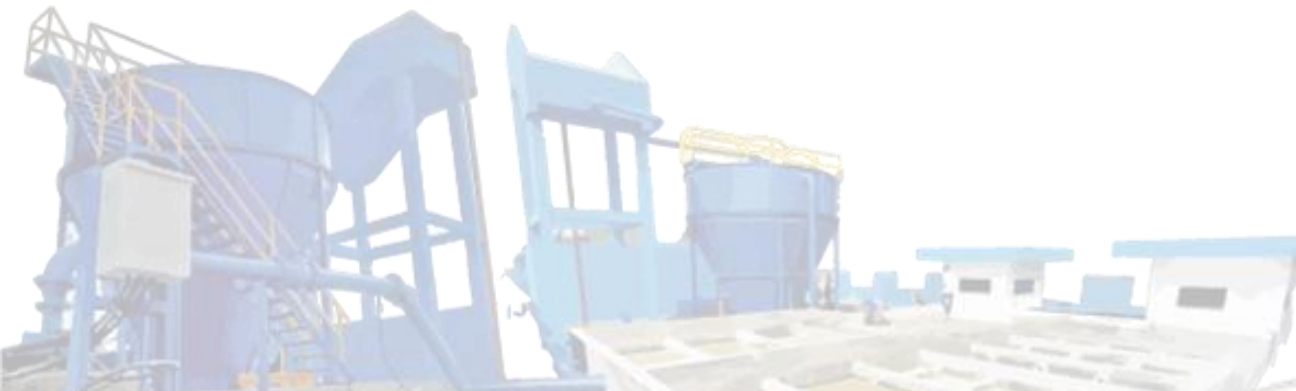
TUJUAN

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air minum jaringan perpipaan bagi masyarakat di daerah perkotaan serta meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemda dan PDAM dalam memberikan pelayanan air minum.

KPI NUWSP

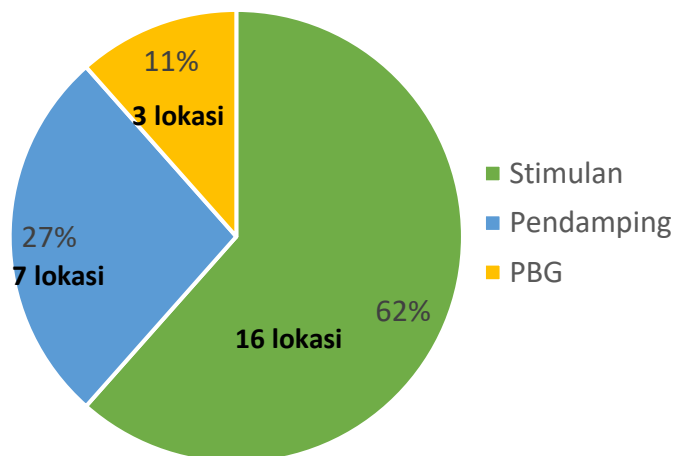
Komponen NUWSP		Total Biaya	NUWSP	APBN/APBD/PDAM/ Sumber Dana Lain	Key Performance Indicator (KPI)	Penanggung Jawab
		(USD Juta)				
A. KEGIATAN FISIK						
1	Dukungan Investasi Infrastruktur Air Minum Perkotaan	70.0	Tambahan minimal 0,2 Juta SR	Tambahan minimal 1 Juta SR	1,2 Juta SR	DJCK, Kemen PUPR
			Setidaknya 40 PDAM mendapatkan bantuan program	Setidaknya 50 PDAM mendapatkan bantuan program	90 PDAM	
B. KEGIATAN NON FISIK						
2	Bantuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Pemda dan PDAM	10.0	<ul style="list-style-type: none">Sampai dengan 200 Pemda dan PDAM berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan peningkatan kapasitasMinimal 20 PDAM mengalami berhasil naik kinerjaSetidaknya 20 PDAM menyiapkan proposal yang bankable			<ul style="list-style-type: none">DJCK, Kemen PUPR
3	Dukungan bagi Pemerintah dalam Pengembangan Kebijakan dan Peningkatan Strategi Pelayanan Air Minum (Bappenas, Kemendagri)	5.0	Tersedianya kebijakan dan panduan penyelenggaraan SPAM perkotaan yang berkelanjutan, inovatif dan tepat sasaran			DJCK, Kemendagri, Bappenas
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek	15.0	<ul style="list-style-type: none">Terselenggaranya proyek sesuai dengan pedomanTercapainya target keluaran dalam kualitas yang baik dan tepat waktu			<ul style="list-style-type: none">DJCK, Kemendagri
Jumlah		100.0				

B STATUS KOMPONEN 1 TA 2020 -2021

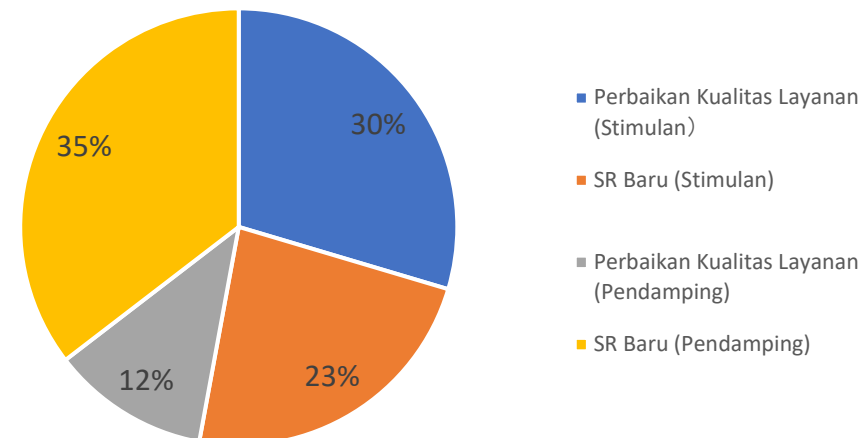


Progres dan Capaian Komponen 1 (TA 2020-2021)

1. Perbaikan Kualitas Layanan dan Peningkatan Akses



22 lokasi mendapatkan bantuan fisik (stimulan dan pendamping) dan 3 lokasi mendapatkan bantuan berbasis kinerja.



Proyeksi peningkatan dan perbaikan layanan:

Perbaikan Kualitas Layanan	88.746 SR
Penambahan Cakupan Layanan	89.183 SR
Total	177.929 SR

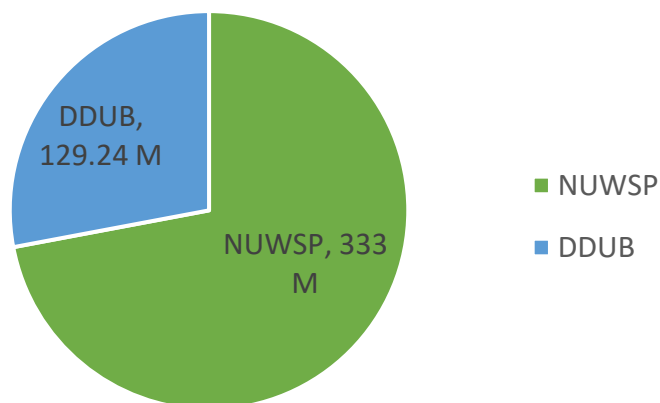
KPI NUWSP sebesar 200.000 SR sampai dengan TA 2022, baru tercapai **±45%** dari KPI.

Progres dan Capaian Komponen 1 (TA 2020-2021)

2. Peningkatan Sharing DDUB Pemda dan Investasi PDAM

- Stimulan: DDUB 40% dari jaringan perpipaan
- Pendamping: Dana pendamping pemda dan investasi PDAM
- PBG: Penyertaan modal untuk strategi penurunan ATR dan peningkatan EE

Prioritas untuk pembangunan JDB



Komitmen alokasi DDUB (total Rp 129.4 M) sebagai syarat ikut serta NUWSP melebihi nilai minimal 40% dari nilai investasi pendanaan jaringan perpipaan NUWSP.

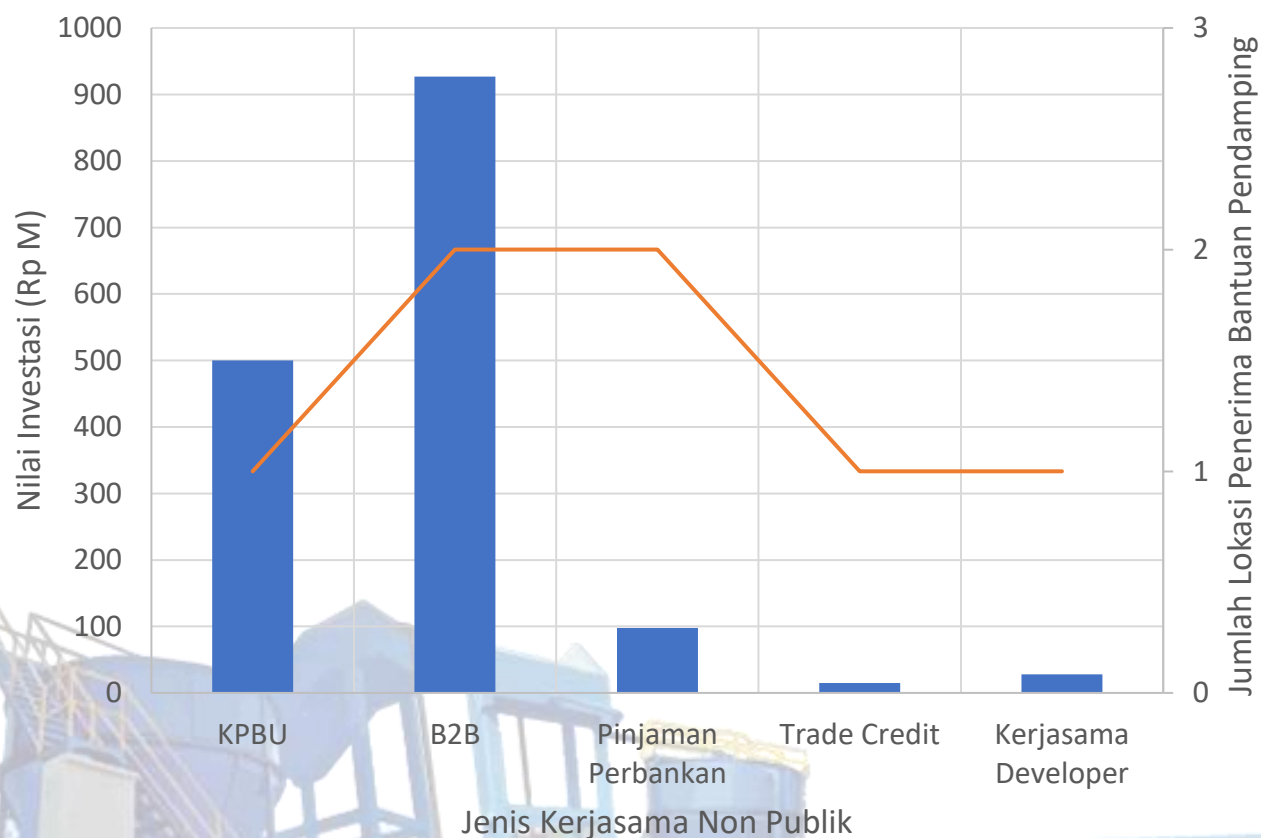
Terdapat **kenaikan tren penganggaran DDUB**

Program Stimulan (11 lokasi TA 2020 dan 5 lokasi TA 2021) dari sebelum adanya kegiatan NUWSP, pada lokasi-lokasi sebagai berikut:

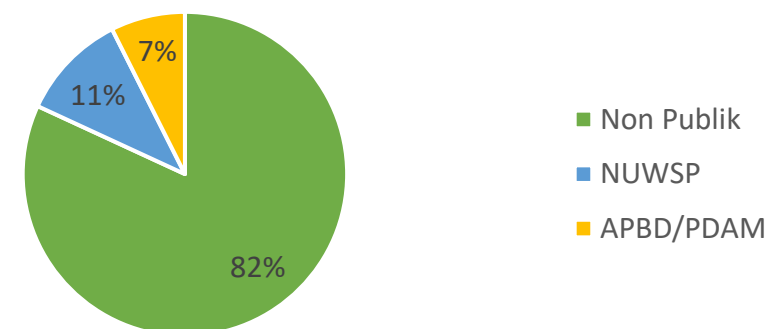
- Dumai
- Bengkulu Tengah
- Blitar
- Lamongan
- Sawahlunto

Progres dan Capaian Komponen 1 (TA 2020-2021)

3. Peningkatan Investasi Kerjasama Non Publik melalui Skema Bantuan Pendamping



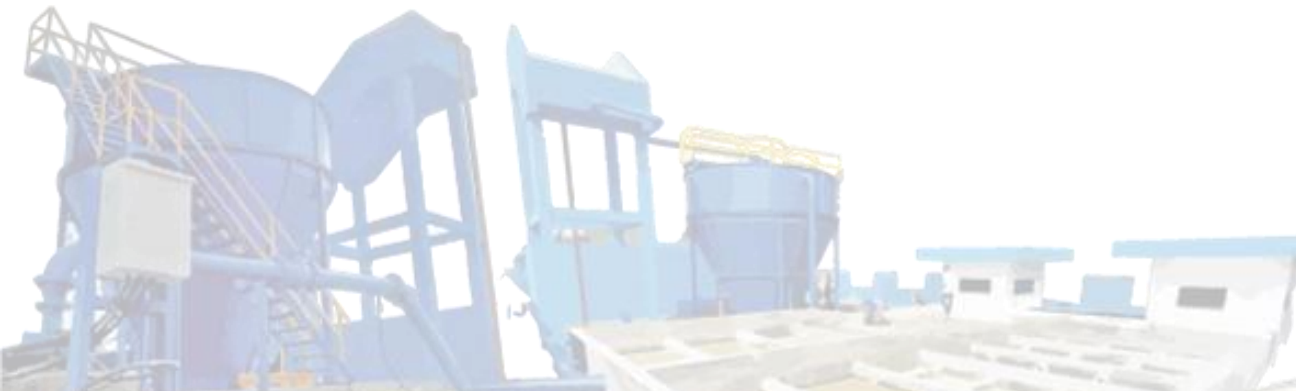
Perbandingan Besaran Investasi



- Total insentif NUWSP yang diberikan sebesar **Rp 206 M (13% dari investasi non publik)**
- 7 lokasi mengikuti skema bantuan pendamping NUWSP melalui berbagai skema pendanaan non publik dengan total investasi non publik sebesar **Rp 1.58 T**
- PDAM dan/atau Pemda juga mengalokasikan dana pendamping untuk pembangunan JDB dan JDL sebesar total **Rp 142 M**
- **Total investasi: 1.93 T**

C

CAPAIAN DAN TARGET KPI



Capaian KPI TA 2020 - 2021

KOMPONEN 1

Dukungan investasi untuk pengembangan infrastruktur

1. Pencapaian KPI leverage cakupan layanan sebanyak 670.000 SR dari 1.2 juta SR atau sebesar **56%** dari target
2. Pencapaian KPI pendanaan NUWSP untuk pembangunan SR baru sebanyak 90.000 SR dari 200.000 SR atau sebesar **45%** dari target
3. 22 lokasi TA 2020 dan 2021 (skema bantuan stimulan dan pendamping) dan 3 lokasi untuk skema bantuan hibah berbasis kinerja

KOMPONEN 2

Peningkatan Kapasitas bagi Pemda dan PDAM

125 lokasi dari 200 lokasi penerima TA/CB atau sebesar **63% dari target**, untuk pelatihan telah terlaksana 2 tahapan dengan peserta sebanyak 46 PDAM.

KOMPONEN 3

Advisori & pengembangan kebijakan Pemerintah Pusat

Implementasi rancangan kerangka NUWAS dalam PMM dan juknis bantuan NUWSP dan akan disupport oleh *Central Advisory Consultant* untuk Menyusun kerangka *National Urban Water Supply* (NUWAS), target terkontrak Nov 2021.

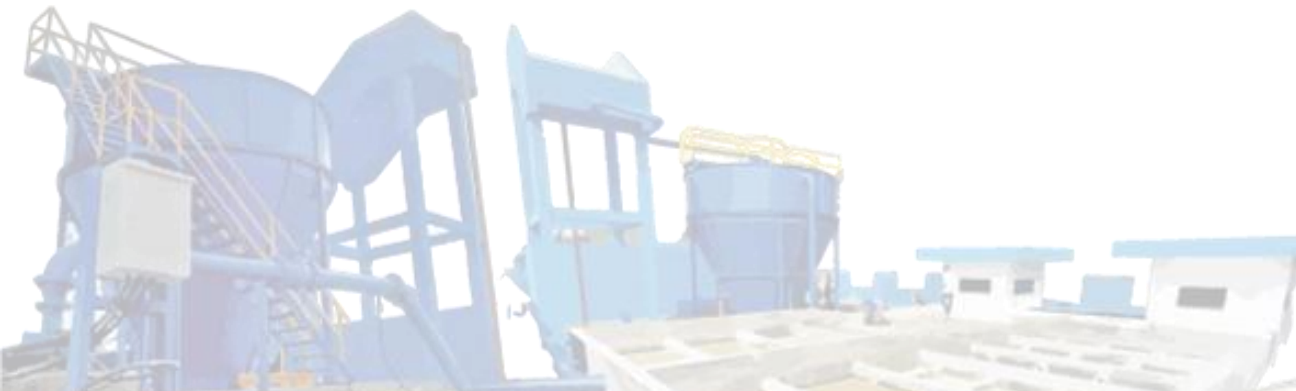
KOMPONEN 4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program

Dukungan manajemen di tingkat pusat, regional, maupun Pemda dan PDAM oleh konsultan pendukung

D

ISU STRATEGIS DAN TINDAK LANJUT



Isu Strategis dan Tindak Lanjut (1/3)

No	Item/Aspek	Isu Strategis	Tindak Lanjut
1.	Proposal Teknis	a. Proposal tidak sesuai dengan isu strategis yang ada di lapangan b. Proposal memerlukan perbaikan substansi	Perbaiki proposal teknis melalui koordinasi intensif dengan RMAC I atau II, maksimal 2 minggu setelah acara. Proposal teknis akan dijadikan acuan ke depannya. Proposal teknis yang belum diperbaiki tidak akan ditindaklanjuti.
2.	<i>Feasibility Study</i> (FS)	a. Penyusunan FS belum dianggap sebagai prioritas b. Penyusunan FS sederhana belum sesuai template	Pendampingan intensif dari RMAC I dan II (baik kepada konsultan FS maupun pegawai PDAM yang bertanggungjawab) sesuai dengan template FS sederhana yang telah disepakati
3.	<i>Business Plan</i> dan RISPAM	Pada saat usulan disampaikan, <i>Business Plan</i> dan RISPAM habis masa berlakunya, atau usulan belum diakomodasi dalam <i>Business Plan</i> dan RISPAM terbaru	<i>Business Plan</i> dan RISPAM perlu direview dengan berkoordinasi dengan Finance RMAC I dan II
4.	DDUB	a. Kepastian pemenuhan alokasi DDUB pada TA 2022 sesuai dengan target konstruksi b. Sinkronisasi perencanaan antara usulan kegiatan DDUB dan NUWSP	Penyampaian bukti penganggaran DDUB sesuai nilai minimal yang disinkronisasi pada proposal teknis dan/atau surat komitmen kepala daerah

Isu Strategis dan Tindak Lanjut (2/3)

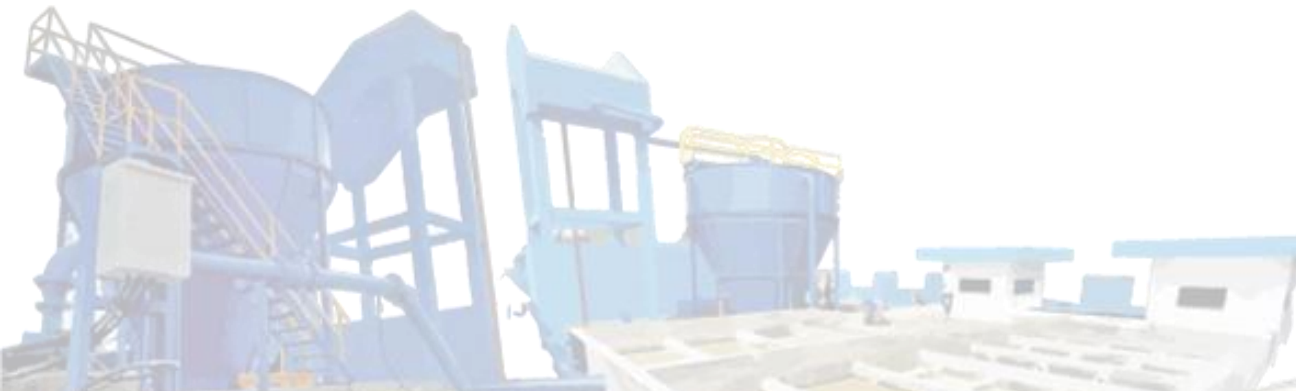
No	Item/Aspek	Isu Strategis	Tindak Lanjut
5.	Dokumen Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Dokumen perencanaan membutuhkan waktu lama (lelang konsultan perencana, mobilisasi konsultan perencana, penyusunan oleh konsultan perencana) b. Kualitas dokumen perencanaan tidak layak teknis dan belum sesuai dengan usulan kegiatan NUWSP 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dilakukan oleh firm konsultan pihak ketiga yang Kredibel b. Dokumen perencanaan disusun/direview setelah proposal teknis disepakati c. Koordinasi intensif dengan RMAC I/II dalam proses review dokumen perencanaan d. Konsultan perencana yang tidak menghasilkan output dan memiliki itikad baik dianjurkan untuk diganti e. Maksimal lelang konsultan perencana selama 3 bulan, dan pengerjaan oleh konsultan perencana selama 3 bulan (total 6 bulan). Apabila melebihi waktu tersebut akan <i>di-drop</i>.

Isu Strategis dan Tindak Lanjut (3/3)

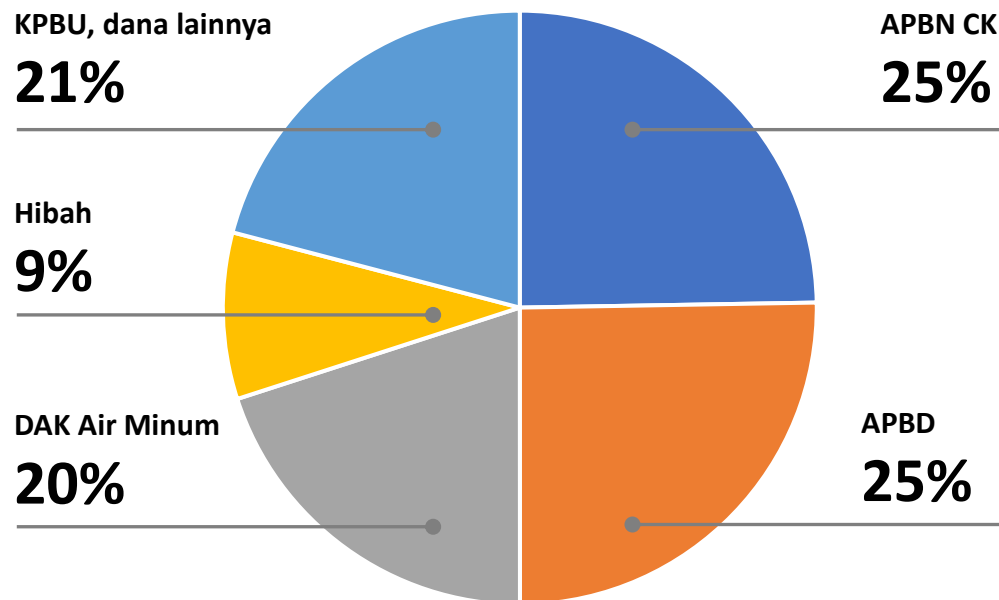
No	Item/Aspek	Isu Strategis	Tindak Lanjut
6.	Perizinan	Pengurusan perizinan air baku, jalan, dan/atau izin prinsip sesuai dengan kebutuhan (Izin Perlintasan Rel KA, Izin perlintasan penggalian dibawah jalan nasional (BPJN) memakan waktu cukup lama	<ol style="list-style-type: none"> Pengurusan izin ke instansi terkait sebelum lelang dilaksanakan Perlu pendampingan pengurusan perizinan sesuai tahapan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (BPPW, PT KAI, BBWS, dsb)
7	Dokumen Safeguard	Diperlukan dokumen lingkungan sebagai syarat pelaksanaan konstruksi. Terdapat isu persetujuan izin lingkungan oleh Kementerian LHK	Penyusunan dokumen <i>safeguard</i> sesuai dengan ketentuan ESMF Bank Dunia dan perundang-undangan yang berlaku dengan didampingi oleh Safeguard RMAC I dan II
8.	Pemenuhan Tarif FCR	PDAM yang mengikuti bantuan NUWSP diharapkan dapat memenuhi tarif FCR dalam waktu pendampingan program	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi strategi pemenuhan tarif FCR tertuang pada FS Komitmen pemenuhan tarif FCR tertuang dalam Nota Kesepakatan, Perjanjian Kinerja, dan Surat Komitmen Kepala Daerah

E

SKEMA BANTUAN PENDAMPING



KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR SPAM



SUMBER DANA	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp)
APBN CK*	34,79 T
APBD*	35,54 T
DAK Air Minum*	28,18 T
Hibah*	12,74 T
KPBU, B to B, lain-lain*	29,43 T
JUMLAH	140,68 T

- Keterbatasan pendanaan publik (APBN dan APBD)
- Target pendanaan APBD tidak sesuai target
- Urgensitas pendanaan non publik untuk membiayai infrastruktur SPAM



Perubahan *mind set* mengurangi ketergantungan pendanaan pemerintah dan melakukan pendanaan non publik dalam pembiayaan infrastruktur SPAM



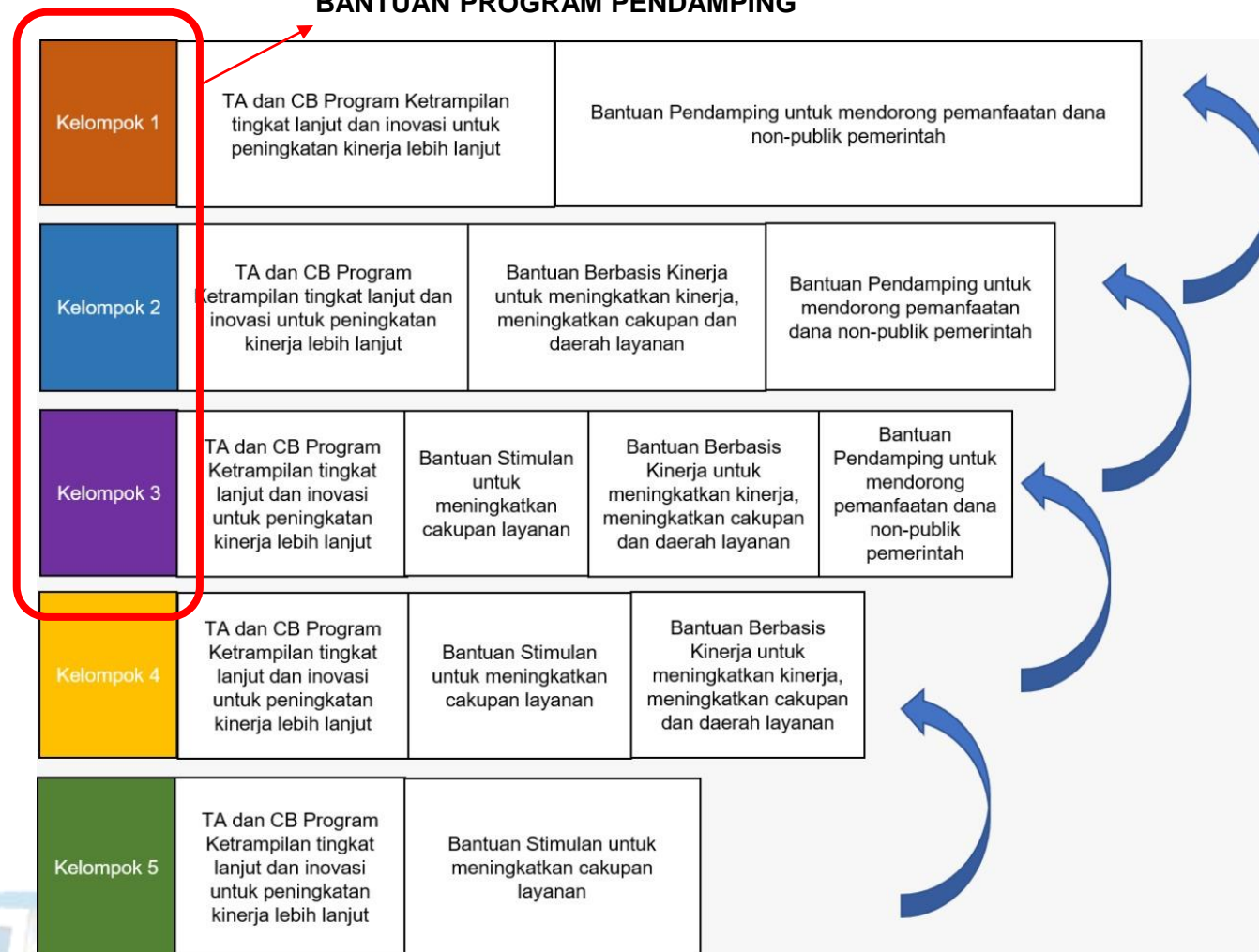
Bantuan pendamping sebagai reward terhadap setiap kerjasama non publik.

SASARAN BANTUAN PENDAMPING



- Bantuan Program Pendamping sebagai salah satu bagian dalam komponen 1 kegiatan NUWSP
- Insentif untuk mendorong Pemerintah Daerah dan PDAM yang memiliki kapasitas dan kelayakan untuk memanfaatkan sumber-sumber pendanaan non-pemerintah.**
- Keikutsertaan (Pemda dan PDAM) berdasarkan SAT:
 - Kategori 1 (Sehat Berkelanjutan)
 - Kategori 2A dan 2B (Sehat),
 - Kategori 3 (Berpotensi Sehat)

BANTUAN PROGRAM PENDAMPING



JENIS KERJASAMA NON PUBLIK

Pinjaman perbankan

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Business to Business (B-to-B)

Sektor Swasta Domestik, contoh developer perumahan

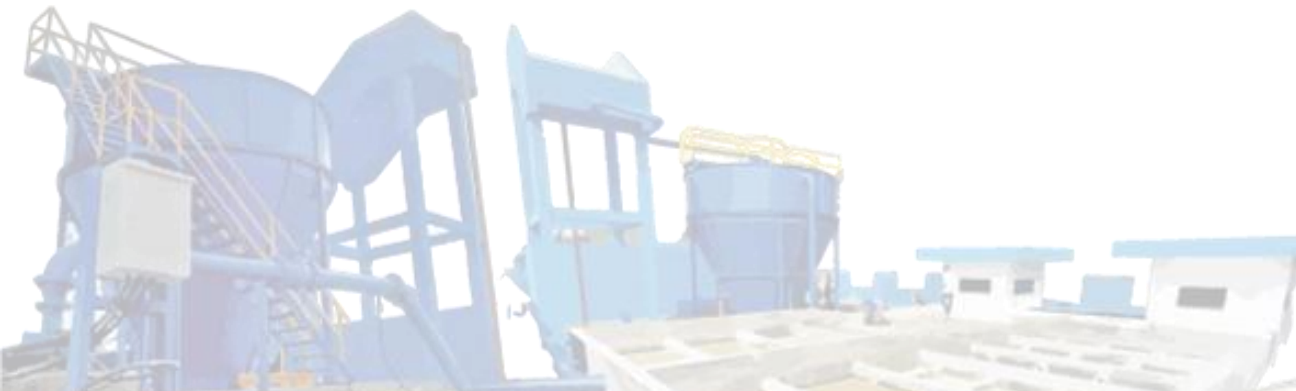
Pasar Modal Domestik

Trade Credit

Bantuan pendamping yang bisa diklaim adalah yang *financial close*/akad credit setelah pelaksanaan sosialisasi atau penyampaian surat minat.

Kerjasama non publik yang *financial close*/akad kredit yang dilaksanakan sebelum sosialisasi/penyampaian surat minat KDH tidak dapat diklaim untuk mendapatkan bantuan pendamping.

F KETENTUAN TEKNIS BANTUAN PENDAMPING



Ketentuan Teknis Bantuan Pendamping (1/3)

No.	Batasan Teknis	Ketentuan Teknis
1.	Sasaran bantuan	Kategori 1 (sehat berkelanjutan), 2A dan 2B (sehat), dan 3 (berpotensi sehat) berdasarkan hasil Self Assessment Toolkit (SAT).
2.	Batasan klaim bantuan	Financial close/akad kredit setelah sosialisasi atau setelah peminatan mandiri berupa penyampaian surat minat KDH
3.	Komposisi pendanaan	Bukan merupakan bagian dari komposisi pendanaan terhadap nilai investasi non publik yang dikerjasamakan
4.	Besaran bantuan	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan estimasi investasi terhadap jumlah SR domestik yang menjadi target penyerapan dari kerjasama nonpublik dalam jangka waktu maksimal 3 tahun setelah konstruksi selesai. Penilaian SR mengacu mempertimbangkan tren penyerapan SR oleh PDAM. Justifikasi teknis penentuan target penyerapan SR mengacu pada dokumen Business Plan PDAM dan feasibility study (FS) yang digunakan pada saat penandatanganan financial close/akad kredit sesuai jenis kegiatan pendanaan non publik yang dikerjasamakan.

Ketentuan Teknis Bantuan Pendamping (2/3)

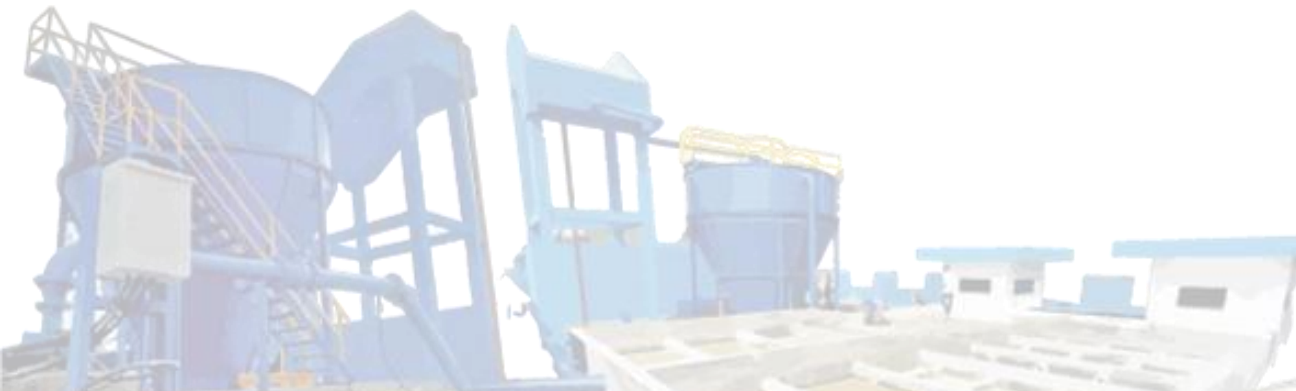
No.	Batasan Teknis	Ketentuan Teknis
4.	Batasan Maksimal Besaran Bantuan	Insentif yang akan diperoleh maksimal sebesar 30% dari investasi kegiatan non-publik atau 5 juta USD/BUMD Air Minum.
5.	Penilaian Usulan Kegiatan dan Besaran	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan secara case-by-case mempertimbangkan tren penyerapan SR beserta aspek teknis/nonteknis lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kerja sama nonpublik dan insentif bantuan pendamping. Dokumen FS, kontrak financial close /akad credit dan business plan menjadi acuan dan harus sinkron.
7	Lokasi Kegiatan Pelaksanaan Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> Insentif untuk kerjasama nonpublik pinjaman atau trade credit dapat dilakukan pada SPAM yang sama atau berbeda dengan kerja sama nonpublik Insentif untuk kerja sama nonpublik dalam bentuk KPBU dan B-to-B hanya dapat dilakukan pada SPAM yang berbeda dengan kerja sama nonpublic Lokasi pelaksanaan insentif diprioritaskan pada peningkatan cakupan wilayah pelayanan pemda dan PDAM peserta NUWSP.

Ketentuan Teknis Bantuan Pendamping (3/3)

No.	Batasan Teknis	Ketentuan Teknis
8.	Batasan Perencanaan dan Konstruksi Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen perencanaan untuk kegiatan bantuan pendamping dilakukan dengan menggunakan biaya penyertaan modal daerah/ PDAM. Pelaksanaan lelang untuk bantuan pendamping dengan jenis kegiatan kerja sama nonpublik berupa pinjaman perbankan/pinjaman RIDF/kredit berbasis angsuran dapat dimulai apabila dokumen perencanaan telah siap lelang dan akad kredit/ penandatanganan financial close telah ditandatangani. Pelaksanaan lelang untuk bantuan pendamping dengan jenis kegiatan kerjasama nonpublik berupa KPBU atau B-to-B, hanya dapat dimulai apabila apabila progress konstruksi kerjasama non publik yang diusulkan telah mencapai $\pm 30\%$ dan dokumen perencanaan telah siap lelang. Kegiatan bantuan pendamping dapat dinyatakan dan dilaporkan selesai apabila pembangunan SPAM sudah terbangun dari hulu ke hilir dan tersambung ke pelanggan/SR.
9.	Lingkup Usulan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan pelayanan domestik

G

READINESS CRITERIA (RC) BANTUAN PENDAMPING



Readiness Criteria (RC) Bantuan Pendamping (1/3)

No.	Readiness Criteria	Kelengkapan
1.	Hasil <i>Self-Assessment Toolkit</i> yang sudah dimutakhirkan dan disetujui Direktur PDAM	V
2.	Surat minat keikutsertaan NUWSP yang ditandatangani oleh kepala daerah	V
3.	Proposal teknis usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui bantuan program stimulan	V
4.	Dokumen Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>) usulan kegiatan NUWSP	V
5.	RKAP PDAM, rencana bisnis (<i>Business Plan</i>) PDAM, dan RISPAM Kabupaten/Kota yang sudah mengakomodir usulan kegiatan NUWSP	V
6.	<i>Detailed Engineering Design</i> (DED) dan RAB usulan kegiatan NUWSP, termasuk memo desain, analisa hidrolis (epanet), spesifikasi teknis	V
7.	Detailed Engineering Design (DED) dan RAB jaringan sekunder dan tersier pendukung kegiatan NUWSP Bantuan Pendamping	V
8.	Daftar topik kegiatan pelatihan yang diperlukan oleh PDAM dan Pemda	V
9.	Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja	V

Readiness Criteria (RC) Bantuan Pendamping (2/3)

Readiness Criteria		Kelengkapan
10.	Surat Pernyataan Komitmen yang disetujui oleh Bupati/Walikota	V
11.	Surat Pernyataan Komitmen penyediaan dana pembangunan Jaringan Distribusi Sekunder dan Tersier, disetujui oleh Bupati/Walikota dan Direktur PDAM	V
12.	Surat Keputusan Pembentukan <i>District Project Implementation Unit</i> (DPIU) yang disetujui oleh Bupati/ Walikota	V
13.	Surat Kesiadaan Menerima Hibah BMN	V
14.	Perjanjian Kinerja antara Pemerintah dan PDAM	V
15.	Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Peraturan Daerah Penyertaan Modal / RKAP PDAM Tahun Anggaran berjalan untuk kepastian pelaksanaan kegiatan pembangunan Jaringan Distribusi Bagi (JDB)	V
16.	Dokumen Safeguard / Dampak Lingkungan dan Sosial <ul style="list-style-type: none"> Form Penapisan Form Safeguard Aspek Lingkungan dan Sosial SPPL / UKL-UPL / AMDAL sesuai dengan rekomendasi Dinas LH 	V

Readiness Criteria (RC) Bantuan Pendamping (3/3)

Readiness Criteria		Kelengkapan
17.	Dokumen Perizinan: <ul style="list-style-type: none"> • Izin Penggunaan Air Baku (Rekomtek/SIPA) • Izin Prinsip (Jalur PLN/Gas/Aparat Keamanan) • Izin jalan (kabupaten/provinsi/nasional) 	V
18.	Kesediaan Lahan (dibuktikan dengan Surat/Akte Kepemilikan Lahan)	V
19.	Dokumen lengkap <i>feasibility study</i> /studi kelayakan Kerjasama pendanaan pihak ketiga	V
20.	Dokumen kelayakan investasi/ <i>financial projection</i>	V
21.	Dokumen lengkap perjanjian Kerjasama antara PDAM dengan pihak ketiga	V
22.	Surat pengantar dokumen FS Kerjasama, finpro, financial closure, <i>business plan</i> , RISPAM, PKS Kerjasama non-publik dari Direktur PDAM ke Direktur Air Minum	V

TERIMA KASIH

Info Lengkap kunjungi dan follow : www.nuwsp.com | [@nuwas_indonesia](https://www.instagram.com/nuwas_indonesia) | [nuwas_pu](https://www.twitter.com/nuwas_pu)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JL. PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, INDONESIA - 12110

